



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI SAPTOHAJI

2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

3. NHK : 274045

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 69 m2/69 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 253.302.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.016.302.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.016.302.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.